

## **MENUNDUKKAN KAUM PEMBURU: KUASA PU SINDOK ATAS PERBURUAN BURUNG DAN BINATANG ABAD X**

**Dennys Pradita 1 , Adi Putra Surya Wardhana 2**

<sup>1</sup> IISBUD Sarea/ Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Wonogiri

<sup>2</sup> Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Wonogiri

Alamat: Ngrembang 01/05, Giriwoyo, Wonogiri

Email: Praditadennys@gmail.com

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa-pengetahuan yang dibangun Pu Sindok untuk menundukkan kaum pemburu burung dan binatang pada abad X. Pada awalnya, perburuan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perut. Pada masa kerajaan kuno, berburu menjadi kesenangan dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Pu Sindok menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi baik oleh pemburu maupun profesi yang berkaitan dengan perburuan lainnya sebagai kontrol atas perburuan. Penelitian ini menggunakan metode Sejarah dengan pendekatan Arkeologi untuk mengungkap perburuan burung dan binatang lainnya melalui peninggalan dari masa Pu Sindok. Penelitian menunjukkan, Pu Sindok membangun pengaruh melalui prasasti-prasasti di wilayah Kerajaan Medang, Jawa Timur. Hewan buruan seperti burung menjadi komoditas ekspor kerajaan tersebut. Pu Sindok membuat beberapa ketetapan dalam prasastiyang mengandung diskursus untuk membatasi perburuan, menjaga kelestarian lingkungan alam, dan memperkuat kekuasaan-otoritas di wilayah Kerajaan Medang dan sekitarnya. Kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada masa Pu Sindok menjadi lebih stabil.

*Kata kunci : perburuan, kekuasaan, Pu Sindok, Kerajaan Medang, Jawa Timur*

## ***CONTROLLING THE HUNTERS: THE POWER OF PU SINDOK FOR BIRDS AND ANIMALS HUNTING IN THE X CENTURY***

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the power-knowledge relationship built by Pu Sindok to control bird and animal hunters in the 10th century. Initially, hunting was carried out to meet the needs of the stomach. During the ancient kingdom times, hunting became a pleasure and met the needs of the economy. Therefore, Pu Sindok constructed rules that must be obeyed by both hunters and other hunting-related professions as control over the hunting. This research used the Historical method with an Archaeological approach to analyze the hunting of birds and other animals through the legacy of the Pu Sindok era. The findings show that Pu Sindok built his power through inscriptions in the kingdom of Medang, East Java. Pu Sindok made several rules in the inscription containing the discourse of limiting hunting, preserving the natural environment, and strengthening the powers of the Medang Kingdom and its surroundings. The implication, social, political, cultural, and economic life during the Pu Sindok period became more stable than before.*

*Keywords: hunting, power, Pu Sindok, Medang Kingdom, East Java*

## I. PENDAHULUAN

Perburuan binatang merupakan tema menarik yang sering diperdebatkan oleh kalangan akademisi lingkungan antara lain Clarissa, et.al. (2018: 644), Gustaman (2019: 235), Pattiselanno (2006: 60), Pattiselanno dan Mentansan (2010: 75). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang perburuan, antara tradisi, ekonomi, dan konservasi.

Di satu sisi, manusia membutuhkan hewan buruan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun ekonomi. Perburuan juga menjadi tradisi bagi suatu masyarakat di daerah pedalaman. Di sisi lain, perburuan memengaruhi kelestarian satwa di habitat aslinya (Pattiselanno dan Mentansan, 2010: 75). Perburuan menyebabkan penurunan jumlah populasi satwa yang mengarah pada kepunahan.

Kajian akademis tentang perburuan tersebut tidak mengkaji fenomena perburuan pada masa Kerajaan Medang. Padahal perburuan pada masa itu menarik untuk dikaji tentang permasalahan ekonomi dan konservasi sekaligus. *Local genius* yang dimiliki oleh Pu Sindok dalam menetapkan kebijakan tentang perburuan patut untuk dikaji sebagai cermin untuk masa kiwari.

Salah satu satwa yang menjadi daya tarik dalam proses perdagangan yaitu burung dan beberapa satwa lainnya yang memiliki nilai ekonomis atau *culture* yang tinggi pada masa Kerajaan Medang. Keberadaan burung dan satwa lainnya sebagai salah satu komoditas di suatu kerajaan dapat dilihat dari peninggalan ataupun catatan yang membahas mengenai keberadaan burung dan satwa lainnya yang ditinjau dari segi ekonomi. Keberadaan burung dan satwa lainnya sebagai salah satu komoditas dapat dilihat dari adanya peninggalan-peninggalan prasasti yang menyebutkan adanya pajak untuk para pemburu dan pembuat sangkar burung.

Prasasti pada umumnya berisi mengenai penetapan *sima*, upacara keagamaan atau persembahan terhadap dewa, silsilah raja ataupun pejabat kerajaan yang diperintah untuk melaksanakan titah raja. Lebih lanjut ada satu hal yang menarik dari sebuah prasasti, yaitu kehidupan masyarakat yang diperintah (Setrawati, 2009: 39).

Prasasti yang ditinggalkan oleh Pu Sindok yang membahas mengenai kehidupan sosial-ekonomi kerajaan lebih banyak mengarah pada pemberian *sima*. Para pemburu diikat oleh ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Pu Sindok. Di sinilah kuasa Pu Sindok dalam mengatur soal perburuan. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengkaji beberapa hal. *Pertama*, kekuasaan Pu Sindok atas wilayah-wilayah di Kerajaan Medang, khususnya di Jawa Timur. *Kedua*, dinamika perburuan burung dan binatang oleh masyarakat Jawa yang hidup di wilayah kekuasaan Kerajaan Medang pada masa Pu Sindok. *Ketiga*, kuasa Pu Sindok dalam menundukkan kaum pemburu sebagai upaya menyelaraskan antara ekonomi dan konservasi.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang prasasti-prasasti pada masa Pu Sindok, di antaranya (Sari dan Wibowo, 2017: 82), (Sinyamin, 2016: 136), (Widiah, 2018: 221). Penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaji tentang informasi yang terkandung dalam

isi prasasti tanpa mengkaji relasi kuasa-pengetahuan yang ada di baliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat penting bagi historiografi lingkungan pada periode Hindu-Buddha karena menunjukkan relasi kuasa-pengetahuan di balik setiap prasasti berkenaan dengan perburuan burung dan binatang pada abad X. Mengungkap relasi kuasa-pengetahuan adalah bagian dari upaya untuk mengisi kekosongan historiografi lingkungan berkait perburuan burung dan binatang pada abad X.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan arkeologi. Metode sejarah digunakan untuk mengungkap perburuan burung dan binatang lainnya dari peninggalan dari masa Pu Sindok (Carr, 2014: 5–7). Penelitian sejarah diawali dengan mengumpulkan sumber. Sumber yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pu Sindok, kebijakan yang dikeluarkan yang tertulis dalam prasasti, penelitian mengenai kerajaan terdahulu, kerajaan yang sezaman dan juga laporan asing yang menyebutkan adanya perburuan pada masa Pu Sindok.

Langkah selanjutnya yaitu kritik sumber. Sumber yang telah terkumpul dilakukan uji sumber. Setelah uji sumber dan sumber terpilih maka dilakukan tahapan berikutnya yaitu interpretasi data. Hasil dari interpretasi inilah yang kemudian ditulis atau dilakukan rekonstruksi mengenai perburuan pada masa Sindok.

Hasil interpretasi dari data-data mengenai perburuan yang terjadi pada masa Pu Sindok ini ditambah dengan teori. Adanya teori dalam analisis sejarah dapat melihat pola-pola dalam sejarah. Tulisan ini menggunakan pendekatan hegemoni Gramsci untuk mengkaji kekuasaan Pu Sindok yang menundukkan kaum pemburu melalui pajak. Pu Sindok berupaya untuk meraih hegemoni dari kaum pemburu yang berada di wilayah kekuasaannya.

Menurut Bierstedt, kekuasaan tidak sama dengan dominasi. Kekuasaan bersifat sosiologis, sedangkan dominasi merupakan konsep psikologis. Kekuasaan dapat ditemukan dalam suatu organisasi formal, sedangkan dominasi di organisasi informal (Bierstedt, 1950: 732). Kekuasaan negara pada tingkat tertentu berhubungan dengan kekerasan karena memiliki kekuatan monopoli dan melegitimasi penggunaan kekuatan fisik (Santoso, 2001: 89). Artinya, kekuasaan yang direpresentasikan oleh Kerajaan Medang memiliki kekuatan fisik untuk memaksa dan menundukkan rakyat. Kekuasaan terbentuk melalui kemenangan kelompok tertentu atas kelompok lainnya (Alvan, 2015: 2).

Berbeda dengan beberapa pendapat tersebut, Foucault mengidentifikasi bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara atau sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan bagi dia ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Af, 2012: 147). Artinya, melalui kebijakan yang dibuat, Pu Sindok telah mendistribusikan kekuasaannya baik kepada para pemburu maupun rakyat Medang secara keseluruhan.

Prasasti yang dikeluarkan pada masa Pu Sindok, yang merupakan basis utama dari penelitian ini merupakan bagian dari kekuasaan (*top*) namun demikian dari adanya data dari pihak penguasa untuk mengatur wilayah kekuasaannya ini menjadi sarana untuk mengetahui kehidupan yang terpinggirkan dari sebuah pemerintahan klasik di Jawa.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kekuasaan Pu Sindok atas Kerajaan Medang

Pu Sindok yang bergelar Sri Isanawikramma Dharmmatunggadewa merupakan raja yang memerintah dinasti baru Kerajaan Mataram Kuno (Medang) di Jawa Timur, yaitu Wangsa Isyana. Nama *abhiseka* tersebut berarti raja yang sangat memuliakan Dewa Siwa (Rahadi, 2013: 36). Pu Sindok bisa mendirikan kerajaan yang baru di Jawa Timur jelas karena ia pewaris sah Mataram Kuno. Sebelum menjadi raja, ia menjabat sebagai *rakryan mapatih i halu dan rakryan mapatih i hino* pada masa pemerintahan Rakai Layang Dyah Tlodhong dan Rakai Sumbah Dyah Wawa.

Jabatan *halu* dan *hino* termasuk elit tinggi kerajaan. *Rakryan mapatih i hino* atau *rakryan mahamantri i hino* biasanya dijabat oleh putra mahkota. Artinya, jabatan tersebut hanya dapat diduduki oleh sosok yang masih memiliki ikatan darah dengan raja (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 185). Secara genealogis, Pu Sindok merupakan cucu dari Sri Permaisuri Dyah Kebi.

Dalam Prasasti Cunggrang disebutkan, “*sang siddha dewata rakryan bawa yayah rakryan binihaji sri parameswari dyah kebi*. Arti petikan teks prasasti tersebut kurang lebih yang diperdewakan Rakryan Bawa(ng) ayah dari Sri Parameswari Dyah Kebi. Dyah Kebi yang dimaksud adalah permaisuri Pu Daksa. Oleh sebab itu, Pu Sindok merupakan cucu Pu Daksa, Raja Mataram Kuno (911-919 M). Berdasarkan genealogi tersebut, Pu Sindok berhak atas takhta Kerajaan Medang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 186).

Pu Sindok mendapat kesempatan untuk naik takhta kala Medang mengalami *pralaya*. Kala itu, pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa dihantam *pralaya* dahsyat sehingga kerabat raja, pejabat istana, dan rakyat harus mengungsi ke arah timur. Pusat pemerintahan juga mesti dipindah ke timur (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 184).

Menurut Coedes, perpindahan pusat pemerintahan ke sebelah timur disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang disebabkan oleh bencana alam (erupsi Gunung Merapi) ataupun wabah penyakit (Coedes, 2017: 181–182). Bencana vulkanik membuat perekonomian Mataram Kuno hancur (Munoz, 2009: 328).

Kemungkinan kedua adalah masalah keamanan. Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke sebelah timur dimungkinkan untuk mengamankan kekuasaannya dari kemungkinan serangan dari Sriwijaya (Coedes, 2017: 181–182). Kekhawatiran Pu Sindok mengenai serangan dari Sriwijaya menjadi kenyataan, hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti yang menyebutkan telah terjadi serangan ke wilayah yang dipimpinnya. Prasasti Anjukladang (937 M) menyebutkan jika pasukan dari Melayu atau Sriwijaya telah sampai di Nganjuk, namun dapat dikalahkan (Boechari, 1976: 1), (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 188).

Alasan lain perpindahan ibukota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah masalah perekonomian. Pelabuhan utama di Jawa Tengah mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat abrasi pantai. Di sisi lain, pelabuhan di Jawa Timur berkembang pesat. Sungai

Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang melalui wilayah-wilayah di Jawa Timur sangat lebar dan dalam untuk dilalui kapal-kapal besar. Oleh sebab itu, wilayah Jawa Timur dianggap bagus untuk mengembangkan perdagangan maritim internasional (Lukitawati, et.al., n.d.: 9).

Selain itu, rakyat Medang merasakan beban berat karena harus membangun monumen-monumen keagamaan seperti Candi Borobudur. Pembangunan tempat-tempat suci yang megah tersebut membuat sawah, pasar, dan aktivitas lainnya terbengkalai. Mereka pun bermigrasi massal ke Jawa Timur karena daya tarik ekonomi delta Sungai Bengawan Solo dan lembah Sungai Brantas (Lukitawati, et.al., n.d.: 9).

Pada 929 M Sindok berhasil menaiki takhta kerajaan setelah mendapat kepercayaan dari rakyat. Kenaikan takhta Sindok mengakhiri eksistensi kerajaan ini di wilayah Yogyakarta-Jawa Tengah (sekarang) sekaligus mengawali kekuasaan di Jawa Timur (Coedes, 2017: 181). Pu Sindok berkuasa sejak 929 sampai 948 M. Bencana dahsyat (*pralaya*) yang disebabkan letusan Gunung Merapi membuat pusat pemerintahan Mataram Kuno mesti dipindah. Dalam kosmologi Jawa, suatu peristiwa *pralaya* menunjukkan kemarahan dewa sehingga mesti disikapi dengan memindahkan ibu kota Kerajaan Medang (Maziyah, n.d.: 9). Di tempat yang baru, seorang raja dapat membangun lagi kesucian kerajaannya.

Pu Sindok segera mendirikan kerajaan baru di Jawa Timur yang beribukota di Tamwlang (saat ini Jombang). Kerajaan tersebut dikenal sebagai Medang. Pu Sindok mempertahankan pusat pemerintahannya di wilayah pedalaman sebagaimana para pendahulunya kala berkuasa di Bumi Mataram. Proses perpindahan dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah dengan para raja bawahan. Agaknya hal ini disebabkan wilayah Jawa Timur masih merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 195). Pusat pemerintahan Pu Sindok berada di lembah Sungai Brantas yang diapit oleh Gunung Semeru dan Wilis. Keadaan geografis semacam ini mirip dengan kondisi sebelum pusat pemerintahan dipindahkan.

Meskipun kerajaan yang dipimpin oleh Pu Sindok merupakan kerajaan yang berbasis agraris, namun demikian kerajaan ini mampu menjalin hubungan perdagangan selayaknya kerajaan yang bercorak maritim. Adanya peninggalan Prasasti Waharu IV (931 M) menyebutkan jika pada masa Sindok mengambil para pekerja dari Papua, Zanzibar, dan Negrilo (Mahmud, 2014: 186).

Bukti relasi antara pedalaman Jawa dengan wilayah yang jauh menandakan bahwa kerajaan ini memiliki mobilitas yang tinggi meskipun berada di pedalaman. Wilayah kekuasaan Pu Sindok tidak dapat diketahui secara pasti, baik pusat maupun batas terluar. Ini karena nama-nama wilayah yang tercantum dalam prasasti belum dapat dikaji lebih lanjut.

Hanya saja, perkiraan pengaruh Raja Pu Sindok dapat diketahui dari persebaran prasasti yang dikeluarkan. Beberapa prasasti berdasarkan tempat ditemukan di antaranya adalah Anjukladang (Nganjuk), Turyan (Malang Selatan), Siman dan Hering (Kediri) (Suhadi, 1982: 301–302). Persebaran temuan prasasti di beberapa daerah menunjukkan pengaruh dari Sindok di tempat tersebut. Dimungkinkan pengaruh Raja Pu Sindok lebih jauh dari lokasi penemuan prasasti.

Berkenaan soal prasasti, Pu Sindok sudah mengeluarkan sekitar tiga puluh prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak masih menjadi *i hino* (Widiah, 2018: 222). Jumlah tersebut berdasarkan hasil penemuan. Tidak menutup kemungkinan masih ada prasasti-prasasti lain yang belum ditemukan atau masih terkubur di dalam tanah.

Puluhan prasasti yang dikeluarkan oleh Pu Sindok menunjukkan bahwa masa pemerintahan cenderung aman dan makmur. Isi prasasti yang ditemukan lebih banyak berkenaan dengan penetapan *sima* dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hanya ada Kerajaan Sriwijaya yang mengancam eksistensi Kerajaan Medang. Namun demikian, Kerajaan Sriwijaya tidak berhasil mengalahkan Kerajaan Medang.

Pemerintahan Sindok dibantu oleh beberapa bawahan yang secara urut dari atas yaitu: *hino, kalu, sirikan, wka, kanuruhan, madander, anggehan, tiruan, halaran, manghuri, tilimpik, dalinan, wadihati, makudur*. Secara garis besar pengelompokan di pemerintahan Sindok dapat dibagi menjadi tiga, yaitu raja; *hino, halu, dan sirikan (mantri katrini)*; *wka*. Pejabat pemerintahan ini dibantu lagi dengan pejabat pemerintahan yang berada di daerah (Suhadi, 1982: 298).

## B. Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa di Wilayah Kerajaan Medang Abad X

Raja Pu Sindok memiliki kekuasaan di pedalaman Jawa bagian Timur. Kekuasaan dari Pu Sindok ditopang dengan adanya *watek* (daerah). Daerah-daerah (*watek*) yang berada di bawah kekuasaan Medang secara struktur pemerintahan tunduk pada perintah Pu Sindok. *Watek* dapat berkembang jika kawasan ini merupakan kawasan yang subur dan berada pada jalur perdagangan (Kulke, 1989: 15–17).

*Watek* yang berada di bawah kekuasaan Pu Sindok bergantung pada pertanian sebagai penopang utama perekonomian. Sektor ekonomi lainnya adalah perdagangan. *Watek* merupakan penyokong perekonomian Kerajaan Medang di bawah kepemimpinan Pu Sindok. Hal ini karena perekonomian kerajaan bergantung pada hasil pertanian dan hasil alam yang diolah di desa-desa di bawah *watek*.

*Watek* dipimpin oleh seorang yang masih memiliki relasi dengan keluarga raja. Di bawah *watek* terdapat struktur pemerintahan yang lebih kecil yaitu *wanua* (desa). Dalam Prasasti Sangguran 924 M, terdapat beberapa pejabat menjalankan pemerintahan terkecil sebagai berikut.

*waharu rikang kalang, tuhan i waharu, tuhan i wadihati, tuhan i makudur, pangurang i makudur, tuhan i pakarangan makaihan, juru kanayakan, i hino samngat gunung, juru panca rarai, juru kalula, parujar i hujung galuh, parujar i wka wiridih, parujar i kanuruhan parujar i sda, parujar iwawang, parujar i madander, parujar i anggehan, sang tuhan i tiruan, sang tuhan i hujung, patih i kanuruhan, patih i hujung, patih waharu, patih tugaran, patih samgat i waharu, patih pangkur, parujar patih, parujar patih i ka, parujar patih i waharu, wahuta i waharu, tuha kalang, pilungah (Suhadi, 1982: 289–299).*

Para pejabat yang membantu *wanua* ini biasa disebut dengan *rama* dan jumlah *rama* dari setiap desa berbeda dikarenakan luas wilayah (Nastiti, 1995: 37). *Wanua* dalam struktur

pemerintahan Pu Sindok terdapat beberapa pejabat yang memiliki fungsi tertentu. *Wanua* ini berlokasi di daerah yang dipimpin oleh beberapa pejabat daerah. Adapun beberapa pejabat kerajaan dan fungsinya adalah *wkas* (penyebarnya berita kerajaan), *tuha banua* (tetua desa), *wariga* (peramal atau ahli perbintangan), *tuha warah* (pengurus pemuda), *hulu wras* (pengurus lumbung padi), *hulu air* (pejabat pengairan), *kalan* (tukang kayu), *tuhalas* (pengawas hutan dan perburuan) (Nastiti, 1995: 36).

*Tuhalas* berhubungan langsung dengan para pemburu. Fungsi dari pejabat ini adalah mengawasi hutan dan juga perburuan. Sayangnya, relasi antara penjaga hutan dengan para pemburu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Prasasti Cungrang. Meskipun demikian, keberadaan pejabat *tuhalas* semakin menguatkan aktivitas perburuan dan profesi pemburu pada masa Pu Sindok.

Meskipun terdapat profesi pemburu, masih ada aturan untuk tetap menjaga keseimbangan alam, yakni aturan untuk memburu (dalam hal ini menangkap ikan) pada siang hari. Tujuan dari aturan ini adalah menjaga alam dari eksploitasi yang berlebihan (Widiah, 2018: 228).

Kehidupan masyarakat yang berada di daerah pedalaman tidak hanya bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan, tetapi juga produksi barang keperluan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah produksi gula, minyak, arang kapur, anyaman, benda-benda dari tanah liat, jerat binatang, jaring, dan perangkap binatang (Nastiti, 1995: 54).

Nastiti tidak menyebutkan adanya profesi pemburu binatang atau pun burung. Namun demikian terdapat profesi pembuat jerat binatang, jaring dan perangkap yang mengindikasikan tentang kegiatan perburuan sejak zaman kerajaan masih berada di Jawa Tengah. Kemunculan beberapa profesi yang lebih spesifik berdasarkan keahlian manusia lebih ditujukan untuk motif ekonomi. Masyarakat mulai terdesak untuk melakukan pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan cara bekerja dengan bidang keahlian tertentu (Sukardi, 1986: 181).

Pada masa pemerintahan Pu Sindok, terdapat beberapa prasasti yang menyebutkan adanya pajak untuk beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah pemikat burung ataupun pemburu binatang. Pemburu binatang merupakan sebuah profesi yang dianggap dapat menghasilkan keuangan dan dapat ditarik pajak untuk kerajaan. Adapun beberapa prasasti yang menyebutkan adanya penarikan pajak ke profesi ini antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1.** Keberadaan Profesi Penunjang Perburuan

No.	Prasasti	Tahun Penetapan	Lokasi Penemuan	Pengawas Hutan	Pembuat Jerat	Pembuat Perangkap Burung	Pembuat Sangkar
1.	Gulung-Gulung	929	Malang		V	V	
2.	Langsutan	929	Malang		V	V	V
3.	Turyan	929	Blitar	V			
4.	Jeru-jeru	930	Malang	V	V	V	
5.	Hering	934	Kediri		V	V	
6.	Anjukladang	937	Kediri		V	V	
7.	Alasantan	939	Mojokerto		V	V	

8.	Shobhamerta	939	Sidoharjo	V			
9.	Paradah II	943	Kediri		V	V	V
10.	Muncang	944	Malang	V			
11.	Wueaduhan	985	Malang		V	V	
12.	Kampak			V	V	V	

Sumber: Setrawati, 2009

Terdapat dua belas prasasti yang menyebutkan tentang profesi-profesi yang mendukung aktivitas perburuan burung ataupun perburuan satwa lainnya. Tahun pembuatan prasasti ini cukup beragam, yaitu sejak tahun 929 M sampai 985 M. Bisa jadi, pembuatan prasasti memiliki rentang waktu yang jauh lebih lama, misalnya Prasasti Kampak yang tidak diketahui tahun penetapannya.

### C. Menundukkan Kaum Pemburu

Prasasti yang dikeluarkan oleh Pu Sindok merupakan media membangun kekuasaan. Melalui prasasti, Pu Sindok membangun hegemoni untuk menundukkan rakyat di wilayah kekuasaan Medang. Seperangkat aturan dibuat dan ditetapkan melalui prasasti yang harus dipatuhi oleh rakyat Medang. Salah satu anggota masyarakat yang ingin ditundukkan oleh Pu Sindok adalah kaum pemburu.

Prasasti yang dikeluarkan Pu Sindok pada Tabel 1 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai masyarakat yang berprofesi sebagai pemburu burung ataupun binatang lainnya. Namun demikian, pendataan pada Tabel 1 dapat diinterpretasi bahwa perburuan sudah berlangsung sejak beberapa abad silam.

Makna perburuan ataupun profesi pendukung perburuan termuat dari prasasti tertua, yaitu Prasasti Gulung-Gulung. Pada baris kedua puluh tujuh disebutkan adanya penarikan pajak ke *makalala* (pembuat jerat binatang) dan *mamisandung manuk* (pembuat perangkap burung).

*...magawai kisi manganamanam mamubut manawang makalalalā mamisaṅdung manuk bhaṭāra ri prāsāda atah pramāṅā i sadra(bya).*

Terjemahan:

pembuat barang anyaman tukang anyaman, tukang bubut, menangkap dengan jaring, membuat jerat memerangkap burung, semua hasil pajaknya untuk Bathara Prasada.

Prasasti ini menyebutkan tentang profesi pemburu binatang atau pemikat atau penangkap burung (Setrawati, 2009: 42–46). Prasasti ini mengandung pesan bahwa profesi-profesi yang berkaitan dengan perburuan burung harus membayar pajak. Hanya saja, pajak yang dimaksud bukan pajak kepada kerajaan. Ini karena daerah yang sudah ditetapkan sebagai perdikan (*sima*) tidak perlu lagi membayar pajak kepada kerajaan. Para penarik pajak kerajaan pun tidak boleh menarik pajak dari daerah perdikan. Pajak di daerah perdikan (*sima*) hanya untuk kepentingan daerah perdikan itu sendiri.



Dalam prasasti di atas jelas disebutkan bahwa pajak digunakan untuk keperluan pemujaan terhadap *Bathara* di *Prasada*. Artinya, para pemburu harus memberikan kontribusi untuk keperluan religi di suatu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah *sima*. Ini dilakukan sebagai sebuah timbal balik atas berkah-rejeki yang sudah diberikan dewata kepada para pemburu tersebut.

Prasasti lain yang menyebutkan adanya perburuan binatang dan burung adalah Prasasti Linggasuntan. Pada baris kedua puluh disebutkan tentang beberapa profesi yang dikenakan pajak yang berhubungan dengan perburuan yaitu profesi pembuat sangkar burung, pembuat perangkap burung, dan pembuat jerat binatang. Pajak yang diambil dari ketiga profesi ini ditujukan kepada *Bathara* dan desa perdikan (*sima*) (Setrawati, 2009: 49).

*..makisi mamubut manganammanam ma nawang (?) manahab mamisaṅdung makalalakala  
kapwa ya tribhāgān drabya hajinya sadūmān marā i bhaṭāra sadūmān marā i sang makmitan  
sima sa dūmān marā i sang mangilala drabya haji...*

Dari Prasasti Linggasuntan dapat diinterpretasi, para pemburu burung dan profesi yang berkaitan dengan perburuan diwajibkan untuk membayar pajak kepada tiga pihak, yaitu pemungut pajak, pemelihara perdikan, dan *Bathara*. Pemungut pajak yang dimaksud tentu saja pejabat kerajaan. Artinya, kebijakan pembebasan pajak kerajaan tidak berlaku di semua daerah perdikan. Kerajaan rupanya masih memperoleh hasil pajak yang diberikan oleh kaum pemburu. Pajak yang diberikan kepada penerima *sima* tentu dimaksudkan karena desa telah memberi kebebasan bagi para pemburu untuk menangkap hewan buruan. Pajak lainnya yang digunakan untuk pemujaan di *Prasada* dimaksudkan sebagai bentuk syukur karena telah diberi rezeki berupa hewan buruan oleh *Bathara*.

Sementara itu, istilah pembuat sangkar burung yang disebutkan dalam prasasti di atas mengindikasikan bahwa memelihara burung merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Jawa kala itu. Burung dijadikan *klangenan*. Prasasti selanjutnya yang menyebutkan adanya profesi pemburu pada masa Sindok adalah Prasasti Jeru-Jeru (930M). Isinya sangat persis dengan Prasasti Gulung-Gulung. Isi prasasti yang disimpan di Museum Nasional adalah sebagai berikut.

*...magaway kisī manganammanam mamubut ma nawang makalalakā mamisa u manuk bhaṭāra ri  
śāla atah pramāṇā i sadrabyahajinya...*

Terjemahan:

pembuat anyaman, pembuat tenunan, tukang bubut, menangkap burung dengan jaring. batara di Sala itulah yang memiliki hak atas pajaknya.

Berdasarkan isi prasasti, profesi pemburu burung dan pembuat perangkap burung dikenakan pajak. Pajaknya diserahkan kepada *Bathara*. Agaknya, semua peraturan yang ditetapkan di daerah *sima* selalu memberikan hasil pajak kepada *Bathara*. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh daerah perdikan (Setrawati, 2009: 55).

Isi serupa mengenai profesi yang berhubungan dengan perburuan burung dan binatang disebutkan dalam Prasasti Hering (856 M). Pada prasasti itu hanya ada dua profesi yang

berhubungan dengan perburuan yang disebutkan, yaitu pembuat jerat binatang dan pembuat perangkap burung (Setrawati, 2009: 50–59).

Prasasti yang mirip dengan Prasasti Hering ditemukan di Kediri. Prasasti tersebut disebut dengan Prasasti Anjukladang. Dalam baris kedua puluh tujuh disebutkan sebagai berikut.

*manahab mamisandung manuk makala kapuaya tribhangan drwya hajinya saduman umara i  
Bathara i sang hyang prasada kabhaktyan i yanjukladang...*

Terjemahan:

pembuat jaring, perangkap burung dan pembuat jerat binatang yang semua hasil pajaknya dibagi tiga yang sebagiannya untuk batara di tempat ibadah Sang Hyang Prasada di Anjukladang.

Isi prasasti di atas tidak berbeda dengan prasasti-prasasti penetapan *sima* lainnya. Kaum pemburu hanya diwajibkan untuk membayar pajak demi keperluan pemujaan *Bathara* di Sang Hyang Prasada. Oleh sebab itu, semestinya pajak yang ditetapkan tidak membebani para pemburu. Beban yang mereka miliki adalah beban moral dan sosial karena pajak tersebut dipersembahkan untuk *Bathara* di Sang Hyang Prasada.

Prasasti lain yang menerangkan tentang kaum pemburu adalah Prasasti Alasantan. Prasasti ini ditetapkan pada 939 M. Prasasti Alasantan terdiri dari dua lempeng. Pada lempeng kedua baris pertama disebutkan tentang dua profesi yang berhubungan dengan perburuan, yaitu pembuat perangkap burung dan pembuat jerat binatang. Pada akhir kalimat di prasasti tersebut dijelaskan adanya batasan maksimal perdagangan yang dikenakan pajak (Setrawati, 2009: 65).

Prasasti Muncang (944 M) menyebutkan tiga profesi yang dikenakan pajak yaitu: pembuat jerat binatang, pembuat perangkap burung, dan pembuat sangkar burung. Prasasti Kampak, yang tidak diketahui tahun terbitnya, menyebutkan hal yang sama dengan Prasasti Muncang, yakni adanya tiga profesi yang dikenakan pajak (Setrawati, 2009: 71–74).

Profesi yang berkenaan langsung dengan pemburu memang tidak disebutkan secara langsung dalam prasasti. Beberapa kali prasasti menyebutkan profesi-profesi yang menyediakan alat dan perlengkapan untuk perburuan seperti pembuat jaring atau pun jerat. Apakah mereka turut terlibat dalam perburuan secara langsung tidak dapat diketahui secara pasti.

Profesi yang berkaitan langsung dengan perburuan burung dan binatang dapat diidentifikasi sejak masa sebelum pusat Kerajaan Medang dipindahkan ke daerah Jawa Timur oleh Pu Sindok. Salah satu jenis profesi tersebut adalah pejabat kerajaan yang bertugas untuk mengawasi hutan dan menarik pajak. Ada dua pejabat yang bertugas mengawasi hutan dan perburuan yaitu *tuha buru*: petugas yang mengawasi perburuan satwa di hutan.

Tugas utama dari *tuha buru* ini mengawasi jumlah perburuan. Jika mencapai pada batas tertentu maka akan dikenakan pajak. Profesi selanjutnya adalah *tuhalas/tuhalasan/pasukalas*, yaitu pejabat yang bertugas menjaga hutan di wilayahnya (Kartakusuma, 1990: 125).

Keberadaan *tuhals* ataupun *tuha buru* belum tentu ada pada setiap daerah. Hal ini dikarenakan setiap desa belum tentu memiliki hutan sebagai basis wilayah kerja dua pejabat tersebut. Lantas, apakah kedua pejabat kerajaan tersebut juga berkerja di desa-desa perdikan belum ada data yang pasti. Jika pun ada, mereka pastilah menyetorkan hasil pajaknya kepada penerima *sima*. Ini karena desa perdikan swatantra adalah desa yang dibebaskan dari pajak kerajaan untuk kepentingan bangunan-bangunan suci.

Selain itu, para pejabat kerajaan dilarang untuk memungut pajak di daerah *sima* swatantra. Petugas daerah yang boleh memungut pajak hanya pemungut pajak dari daerah itu sendiri. Itupun untuk kepentingan desa, perawatan bangunan suci, dan pemujaan kepada *Bathara*. Hal ini tentu meringankan beban para pemburu karena mereka hanya bertanggung jawab kepada penerima *sima*, bukan membayar pajak langsung kepada raja. Hanya saja, daerah *sima* tidak benar-benar bebas pajak. Masih ada *sima* yang dimasuki oleh pejabat pemungut pajak sebagaimana ditunjukkan oleh Prasasti Linggasuntan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 250–251).

Prasasti-prasasti penetapan *sima* yang menyebutkan profesi-profesi terkait dengan perburuan menggambarkan bahwa hasil-hasil buruan juga menjadi komoditas di wilayah Kerajaan Medang (Jawa Timur). Hal ini diperkuat dengan adanya berita dari Cina mengenai ekspor Kerajaan Medang yang ditulis oleh Chau Ju Kua (Nastiti, 1995: 65).

Beberapa prasasti yang sudah ditemukan juga tidak menyebutkan jenis burung yang diburu pada masa Pu Sindok. Fungsi dari perburuan burung tersebut juga tidak disebutkan. Apakah burung yang diburu digunakan untuk konsumsi pribadi, diperjualbelikan di pasar lokal, dijadikan komoditas internasional, atau digunakan untuk sesaji kepada *Bathara*. Fungsi di sini mengacu pada pemilihan binatang yang diburu. Apakah binatang atau burung ini memiliki nilai ekonomis atau magis tidak disebutkan.

Namun demikian, ada beberapa jenis burung yang dilindungi. Artinya, beberapa jenis burung tidak boleh diburu baik untuk konsumsi pribadi maupun diperjualbelikan. Ada jenis-jenis burung tertentu yang bermakna bagi masyarakat Jawa pada waktu itu. Realitas ini direpresentasikan dalam relief candi sebelum abad X ketika Medang masih berpusat di Jawa Tengah. Kepercayaan yang hinggap di alam pikiran masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh pengaruh agama ataupun kepercayaan yang berkembang di masyarakat (Pradita, 2020).

Pada sekitar abad X di Sumatera, tepatnya di wilayah Kerajaan Sriwijaya, terdapat laporan-laporan mengenai perdagangan burung. Perdagangan burung di wilayah Sriwijaya dapat menjadi pembanding dengan yang terjadi di wilayah Medang. Sriwijaya memperdagangkan burung ke luar wilayah. Komoditas perdagangan burung pada masa Sriwijaya di antaranya adalah burung merak, burung kakak tua, dan bulu burung pekakak (Amelia, 1989: 5).

Relasi perdagangan burung antara Sriwijaya dan Medang tentu membutuhkan kajian lebih lanjut. Ini karena ketiadaan data yang dapat memastikan perdagangan burung dari wilayah kekuasaan Sriwijaya ke wilayah kekuasaan Medang ataupun sebaliknya. Data

tentang pengaruh permusuhan di antara kedua kerajaan pada sektor perdagangan juga sangat minim.

Sementara itu, Kerajaan Medang menjalin hubungan dagang yang erat dengan Tiongkok, dibuktikan dengan keberadaan Juru Tiongkok (Haryono, 2012: 88), (Soegihartono, 2015: 189). Apakah para pedagang dari Medang atau melewati Sriwijaya untuk menuju ke Tiongkok atau pun sebaliknya juga tidak ada data yang pasti.

Selain burung, binatang buruan lain yang menjadi komoditas adalah kijang. Daging kijang sering digunakan sebagai hidangan pada abad X. Kijang merupakan binatang buruan yang hidup di hutan. Tidak ada laporan yang menyebutkan jika kijang merupakan binatang yang ditenakkan oleh masyarakat. Kijang merupakan hewan buruan istimewa di kalangan bangsawan. Misalnya saja dalam kisah Mahabharata, para pangeran atau pun raja gemar berburu kijang seperti kisah Pandu yang tidak sengaja membunuh kijang jelmaan seorang Rsi (Sundari, 2020: 257). Tidak hanya sebagai binatang buruan, kijang juga dimanfaatkan untuk ritual keagamaan (Sukardi, 1986: 197).

Selain kijang, ada perdagangan gading gajah, cula badak, dan kulit penyu (Pradita, 2018: 391). Perdagangan bagian-bagian dari hewan buruan tersebut didokumentasikan melalui berita Tiongkok (Nastiti, 1995: 65). Bukti tekstual dari Tiongkok menunjukkan bahwa hasil perburuan pada masa Pu Sindok diperdagangkan di pasar lokal maupun internasional.

Data yang diperoleh dari relief-relief candi di Jawa seperti Candi Prambanan (abad IX), Borobudur (abad IX), Sojiwan (abad IX), Candi Surowono (abad XIV), menggambarkan beragam fauna seperti gajah dan kijang (Eni, 2019: 88), (Febrianto dan Idris, 2018: 46), (Hidajat, 2018: 51), (Riyani, 2015: 15). Keduanya merupakan hewan liar yang tidak didomestikasi. Dalam sebuah kajian, Pradita mempertanyakan tentang eksistensi gajah di Jawa. Gading gajah dimungkinkan berasal dari daerah luar Jawa yang dibawa pedagang ke Tiongkok melalui wilayah kekuasaan Medang di Jawa Timur (Pradita dan Nugroho, 2020: 71)

Berkaitan dengan keberadaan gajah di tanah Jawa, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa gajah memang pernah hidup di Jawa. Berdasarkan bukti-bukti paleontologi, banyak ditemukan fosil gajah purba di daerah Sangiran, Jawa Tengah (Budiantoro, et al., 2012: 2). Hanya saja, gajah tersebut sudah punah sehingga tidak bisa diidentifikasi sebagai gajah yang hidup pada masa periode Medang. Sementara itu, gajah “modern” (*elephas sp.*) dapat diidentifikasi melalui beberapa bukti.

Gambaran keberadaan gajah “modern” di Jawa abad XII-XIII dapat ditafsirkan dari catatan Chau Ju Kua berjudul *Chu Fan Chi* sebagai berikut.

*The king wears his hair in a tuft (or knot), on his head is a golden : bell; he wears a silken robe and leather shoes. His throne is a square seat, and his officers at their daily audience bow three times when withdrawing. When he goes forth he rides an elephant, or is carried in a chair, followed by a company of from five hundred to seven hundred armed soldiers (Chau Ju kua, 1911: 76).*

Pada bagian lain dijelaskan tentang komoditas ekspor yang berasal dari Jawa (Sho-p'o) pada masa itu sebagai berikut.

*The fruits comprise big gourds, coconuts, bananas, sugar-cane and taro. They have also elephants' tusks, rhinoceros horns, pearls, camphor, tortoise-shell, sandal-wood, aniseed, cloves, cardamoms, cubebs, laka-wood, mats, foreign sword blades, pepper, betelnuts, sulphur, saffron, sapan-wood and parrots (Chau Ju-kua, 1911: 77-78).*

Selain itu, eksistensi gajah di Jawa dapat dibaca dalam kisah pemberontakan Sadeng terhadap Majapahit (Kerajaan Majapahit berdiri sekitar dua abad setelah masa Kerajaan Medang di Jawa Timur). Sang Adipati Sadeng memiliki pasukan gajah sebagai andalan. Lalu, bukti otentik tentang kehidupan gajah di Jawa pada masa Majapahit (abad XIII-XVI) terdapat dalam Kakawin Negarakertagama (ditulis abad XIV) sebagai berikut.

*Yangkat / çri natha sakeñ kapulunan ikanan rajabhrtya niriñ sòk, salwaniñ rajamarggäparimita hibkan / syandanomwat matambak, wwanñ niñ wwanñ pekhanin peka tka saha padati harp / mwanñ ri wuntat, dudwanñ wadwa darat / seh girimisen amedep / mwanñ gajaçwadi kirnna (Negarakertagama, pupuh 18, bait I).*

Sri Nata berangkat dari Kapulungan diikuti oleh para abdi berjalan berkirab. Sepanjang jalan penuh dengan kereta. Para penumpang duduk berjejal. Pedati di depan dan di belakang. Di tengah prajurit berjalan kaki, berdesak-desakan, berebut jalan dengan binatang gajah dan kuda.

*Nrpati halintan i banasara mwan i sankan adoh, datn i pamingir in pura pilih ghatita rwa huwus, sakahnu sòk lebuñ nika gajaçwa padatyasusun, ki- (117b) mutanñ maranñ kbo gaway apandarar ardda pnuh (Negarakertagama, pupuh 59, bait II).*

Sri Nata sudah lama melewati Banasara dan Sangkan Adoh. Pukul dua sudah tiba di perbatasan kota. Sepanjang jalan bersesakan dengan gajah, kuda, pedati, kerbau, banteng dan prajurit sibuk berebut jalan.

*An manka kottaman / çri narapati siniwiñ tiktawilwaikanatha, saksat / candrenñ sarat / kastawaniran agawe tustaniñ sarwwaloka, lwir padmanñ durjjana lwir kumuda sahana sanñ sajanasih tke twas, bhrtya mwanñ koça len / wahana ga- (128b) ja turagadinya himper samudra (Negarakertagama, pupuh 83, bait I).*

Demikianlah keluhuran Sri Nata Ekananta di Wilwatika. Dimuliakan laksana bulan di musim gugur yang terlalu indah dipandang. Durjana laksana tunjung merah, sujana bak teratai putih. Abdi, harta, kereta, gajah, kuda berlimpah ruah bak samudera.

Berdasarkan data relief candi yang dibangun abad IX-XIV, berita Tiongkok (abad XII-XIII), dan Kakawin Negarakertagama (abad XIV) menunjukkan bahwa gajah bukan sekadar hewan mitologis bagi orang Jawa abad IX-XIV. Gajah memang pernah hidup di Jawa pada masa Pu Sindok (abad X). Lantas, keberadaannya hilang sama sekali agaknya berkaitan dengan perburuan yang cukup masif pada masa Pu Sindok (Medang Jawa Timur) hingga Majapahit. Kepunahan gajah Jawa agaknya dipengaruhi pula oleh maraknya jual beli gading gajah sebagaimana dicatat dalam buku catatan Cha Ju Kua.

Narasi historis di atas menunjukkan bahwa perdagangan satwa buruan seperti burung, gading gajah, kijang, cula badak, dan kulit penyu sangat masif pada masa Pu Sindok berkuasa di Medang (Jawa Timur) abad X. Maraknya perdagangan hewan buruan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pu Sindok terhadap para pemburu.

Para pemburu yang hidup di wilayah perdikan diberi kebebasan untuk tidak membayar pajak pada kerajaan. Di daerah *sima* lainnya, pemburu masih memiliki kewajiban untuk menyetor pajak kepada kerajaan. Mereka juga diwajibkan untuk membayar pajak kepada penerima *sima* dan keperluan *Prasada*. Sementara itu, pemburu yang tinggal di luar wilayah perdikan diawasi oleh *tuha buru*. Pungutan pajak yang diberlakukan kepada para pemburu bisa diinterpretasi sebagai langkah untuk membatasi perburuan demi keseimbangan alam. Oleh sebab itu, jumlah hewan buruan dibatasi. Jika sampai batas tertentu akan dikenakan pajak (Kartakusuma, 1990: 125).

Pemberian kewenangan dari Pu Sindok kepada daerah *sima* untuk menarik pajak demi kepentingan pengembangan daerah dan aktivitas religius jelas mengandung maksud tertentu. Hal ini dibuktikan dengan jumlah prasasti penetapan *sima* yang sangat banyak pada masa Pu Sindok. Ia ingin meraih kuasa dari para pemburu melalui konstruksi pengetahuan di dalam prasasti yang ditetapkan.

Pengetahuan tentang kepedulian Sang Maharaja kepada kelestarian satwa dan lingkungan disebarluaskan melalui pejabat *tuha buru* dan *tuhalas*. Pengetahuan tentang kemurahan hati dan kepedulian pada kelestarian satwa Sang Maharaja bakal ditanggapi dengan ketundukan dan kepatuhan dari para pemburu dan rakyat yang pekerjaannya berhubungan dengan perburuan. Keberhasilan Pu Sindok dalam membangun kuasa ditunjukkan dengan ketiadaan pemberontakan. Masa pemerintahannya dilalui dengan bersahaja.

Realitas ini paralel dengan pendapat Foucault tentang kekuasaan. Menurutnya, relasi antara kekuasaan dan pengetahuan saling memengaruhi (Foucault, 1995: 27). Kekuasaan yang dimiliki oleh sang empunya kuasa menjadi kekuatan untuk memengaruhi tingkah laku orang lain agar berperilaku sesuai kehendak pemilik kuasa (Marbun, 1996: 30). Demikian pula Pu Sindok yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi tingkah laku kaum pemburu agar berperilaku sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai kehendaknya. Selain itu, ketetapan-ketetapan yang dibuat merupakan cara untuk menunjukkan otoritasnya sebagai raja yang berdaulat penuh. Dengan demikian, kekuasaan Pu Sindok menjadi lebih kuat karena disertai dengan otoritas sebagai Sri Maharaja atas Kerajaan Medang (Jawa Timur).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur, Pu Sindok berusaha membangun hegemoni kekuasaan. Pu Sindok berusaha untuk menundukkan wilayah-wilayah yang baru saja dikuasai. Cara yang digunakan adalah melalui anugerah *sima* terhadap wilayah-wilayah yang dianggap berkontribusi bagi Kerajaan Medang. Pu Sindok juga

berupaya untuk menundukkan kaum pemburu dan segala profesi yang berkaitan dengan perburuan burung dan binatang sebagaimana tersurat dalam beberapa prasasti. Profesi-profesi tersebut di antaranya adalah pembuat sangkar burung, pembuat jerat dan pembuat perangkap burung.

Dengan ketentuan yang disebutkan dalam prasasti, semua profesi menyangkut perburuan mesti tunduk pada peraturan pajak yang ditetapkan oleh raja. Di daerah *sima* mereka wajib membayar pungutan untuk keperluan desa dan *Prasada*, meskipun ada pula daerah perdikan yang tetap dimasuki oleh pejabat pemungut pajak kerajaan. Pajak tidak menyurutkan kegiatan perburuan. Sebaliknya pungutan pajak yang diterapkan kepada profesi berkait dengan perburuan menunjukkan bahwa hasil-hasil buruan bernilai ekonomis yang tinggi di pasar lokal, regional, dan internasional.

Ketetapan yang dibuat oleh Pu Sindok sejatinya mengandung relasi kuasa-pengetahuan. Sang Maharaja membangun pengetahuan yang bersifat menundukkan kaum pemburu. Ketentuan-ketentuan yang berisi pengetahuan tersebut memiliki maksud tersembunyi, yaitu meraih hegemoni dari kaum pemburu. Pajak membuat para pemburu dan orang-orang berkait perburuan mengakui kekuasaan dan anugerah raja.

Kebijakan pungutan pajak juga dimanfaatkan untuk membatasi jumlah perburuan agar tidak berlebihan. Hal ini merupakan wacana untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Wacana-wacana yang dibangun memengaruhi kekuasaan dan otoritas Sang Maharaja sehingga Pu Sindok dipuja oleh rakyat Medang sebagai raja yang tegas dan bijaksana. Selain itu, wacana yang dibangun membuat para penguasa lokal dan bangsawan lain enggan untuk melakukan perlawanan atau pun pemberontakan selama masa pemerintahannya.

## **B. Saran**

Penelitian terkait dengan perburuan burung dan binatang lainnya pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha masih sangat minim. Data-data arkeologis dan filologis memang masih terbatas untuk menjelaskan tentang perburuan di berbagai wilayah di nusantara. Namun demikian, keterbatasan data tersebut justru dapat dijadikan pemantik untuk mencari sumber-sumber alternatif lain guna mengungkap perburuan burung dan binatang lainnya pada masa lampau. Dengan demikian, narasi-narasi empirik yang dibuat dapat menjadi masukan bagi kebijakan lingkungan dan konservasi satwa di masa kini dan masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Af, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 2(1), 132–149.
- Alvan, M. R. (2015). Kekuasaan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. *JOM FISIP* 2(2), 1–11.

- Amelia. (1989). "Sriwijaya sebagai Pelabuhan antara Abad VII- XII", dalam N. Magetsari (ed.), *Pertemuan Imiah Arkeologi IV* (hal. 1–13). Yogyakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Bierstedt, R. (1950). "An Analysis of Social Power", dalam *American Sociological Review* 15(6), 730–738. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/2086605>
- Boechari. (1976). "Some Conciderations of the Problem of the Shift of Mataram's Center of Goverment from Central to east Java in the 10th Century A.D", dalam *Bulletin of the Research Centre Of Archaeology of Indonesia* 10, 1–28.
- Budiantoro, F. P. M. H., Partaya, dan Sari, D. F. (2012). "Keanekaragaman Fosil Mikroforaminifera pada Singkapan dan Pucangan di Sangiran Formasi Kalibeng, dalam *Unnes Journal of Life Science* 1(1), 1–7.
- Carr, E. H. (2014). *Apa itu Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu.
- Chau Ju Kua. (1911). *On the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries*. (F. Hirth dan W. W. Rockhill, ed.). St. Petersburg: Printing Office of the Imperial Academy of Sciences.
- Clarissa, M., Nurusholih, S., dan Nurbani, S. (2018). "Kampanye Pelestarian Owa Jawa (Studi tentang Pelestarian Owa Jawa dalam Upaya Mencegah Perburuan Satwa Langka)", dalam *e-Proceeding of Art & Design* 5(2), 644–653.
- Coedes, G. (2017). *Asia Tenggara Masa Hindhu-Budha*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Eni, S. P. (2019). "Memahami Relief-relief pada Candi-candi Kerajaan-kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit di Jawa Timur", dalam *Jurnal SCALE* 6(2), 69–93.
- Febrianto, R., dan Idris, M. (2018). Kisah Relief Fauna pada Candi Borobudur. *KALPATARU Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 2(2), 44–56.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: VINTAGE BOOKS.
- Gustaman, B. (2019). Sisi Lain Kehidupan *Preangerplanters*: Dari Perburuan hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar. *Patanjala*, 11(2), 235–248. <https://doi.org/DOI: 10.30959/patanjala.v11i2.505>
- Haryono, T. (2012). "Masyarakat Jawa Kuna dan Lingkungannya pada Masa Borobudur", dalam H. Santiko (ed.), *100 Tahun Pascapemugaran Candi Borobudur Trilogi 1: Menyelamatkan Kembali Candi Borobudur* (hal. 81–98). Magelang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- Hidajat, H. (2018). "Visualisasi Hewan pada Relief Ramayana Candi Prambanan". *Jurnal Titik Imaji* 1(1), 46–53. Diambil dari <http://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/>
- Kartakusuma, R. (1990). "Konsepsi dan Pelestarian Hutan Bagi Masyarakat Jawa Kuno", dalam *Analisis Hasil Penelitian Arkeologi III* (hal. 123–134). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



- Kulke, H. (1989). "Epigraphical References to the "City" and the "State" in Early Indonesia", dalam *Early Indonesia State Formation Durring the Asociacion for Asian Studies Meeting*. Wassington DC.
- Lukitawati, D., Wartoyo, F., dan Widjijanto. (n.d.). *Perpindahan Kerajaan Mataram Hindu Jawa Tengah Ke Jawa Timur Abad X Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, 1–13. Diambil dari [lppm.stkipgri-sidoarjo.ac.id](http://lppm.stkipgri-sidoarjo.ac.id)
- Mahmud, R. I. (2014). "Komoditas dan Perdagangan di Papua Masa Sejarah". *Berkala Arkeologi*, 34(2), 185–198.
- Marbun, S. F. (1996). "Pemerintah Berdasarkan Otoritas dan Kekuasaan". *Jurnal Hukum*, 28-43.
- Maziyah, S. (n.d.). *Kondisi Jawa Tengah pada Abad VIII sampai Abad XV M*, hlm. 1–12.
- Munoz, P. M. (2009). *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta: Mitra Abadi.
- Nastiti, T. S. (1995). *Peran Pasar di Jawa pada Masa Jawa Kuno pada Masa Mataram Kuna (Abad VIII-XI M)*. Universitas Indonesia.
- Pattiselanno, F. (2006). "The Wildlife Hunting in Papua". *Biota* 11(1), hlm. 59–61.
- Pattiselanno, F., dan Mentansan, G. (2010). "Kearifan Tradisional Suku Maybrat dalam Perburuan Satwa Sebagai Penunjang Pelestarian Satwa". *Makara, Sosial Humaniora* 14(2), 75–82.
- Poesponegoro, M. D., dan Notosusanto, N. (ed.). (2008). *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno* (Edisi Pemu). Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradita, D. (2018). "Mitologi sampai Perdagangan: Status, Peran, dan Makna Burung dalam Masyarakat Jawa dari Zaman Kolonial Hingga Milenial", dalam P. Yuda (ed.), *Konferensi Peneliti dan Pemerhati burung (KPBB) IV Semarang* (hal. 388–402). Semarang.
- Pradita, D. (2020). *Konservasi Burung di Indonesia Tahun 1922 sampai 1970an: Dari Kesadaran Kultural ke Kesadaran Lingkungan*. Universitas Gadjah Mada.
- Pradita, D., dan Nugroho, A. (2020). "Relief Candi Borobudur, Prasasti, dan Berita Asing: Visualisasi Perburuan Masa Mataram Kuno". *Jurnal Sejarah* 3(2), 63-72. <https://doi.org/DOI/10.26639/js.v3i2.264>
- Rahadi, D. G. B. (2013). "Konsistensi Raja Airlangga dalam Menjalankan Dharma di Jawa Timur Abad X-XI M". *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1(1), 34–43.
- Riyani, M. (2015). "Local Genius Masyarakat Jawa Kuno dalam Relief Candi Prambanan". *Jurnal Seuneubok Lada* 2(1), 9–20.
- Santoso, T. (2001). "Kekuasaan dan Kekerasan". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 4, 89–102.

- Sari, W. I. D., dan Wibowo, A. M. (2017). “Prasasti Anjuk Ladang di Nganjuk Jawa Timur (Sejarah dan Potensinya sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah)”. *Jurnal Agastya* 7(1), 82–103.
- Setrawati, N. (2009). *Perdagangan pada Masa Pu Sindok*. Universitas Indonesia.
- Sinyamin. (2016). “Prasasti Turryan Menengok Bendungan Jaman Kuno di Turen (Suatu Kajian IPS Terpadu Peninggalah Sejarah)”. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS* 1(2), 136–144.
- Soegihartono. (2015). “Pengaruh Akulturasi Tionghoa & Jawa Dalam Perkembangan Bisnis di Semarang”. *RESPONS* 20(2), 169 – 215.
- Suhadi, M. (1982). “Sedikit Tinjauan Tentang Struktur Pemerintahan Zaman Sindok dan Zaman Majapahit”. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi II*. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen P dan K.
- Sukardi, K. Y. (1986). “Sumber Daya Pangan pada Masyarakat Jawa Kuno: Data Arkeologi-Sejarah Abad IX-X Masehi”, dalam *Manusia, Lingkungan Hidup dan Teknologi* (hal. 188–210). Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sundari, A. (2020). “The Figure Of Yudhistira In Swargarohanaparwa (A Moral Philosophy Education Of Java In Ancient Literature Works Mahabharata)”. *Jurnal Kata: Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra* 4(2), 250–260. <https://doi.org/10.22216/kata.v4i2.5273>
- Widiah, S. (2018). “Studi Historis Prasasti Cunggang Sebagai Sumber Sejarah pada Masa Mpu Sindok Tahun 929-947 M”. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 6(1), 221–237.